

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021**

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, penyusunan Renstra SKPD difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah *Urusan Pangan* sedangkan yang menjadi Urusan Pilihan yaitu *Urusan Perikanan*.

Dokumen Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2016-2021 adalah derivasi dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUAPPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 -2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
14. Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi SKPD.

2. Tujuan

Adapun penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2016 – 2021 ini ditujukan untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib yaitu Urusan Pangan dan untuk Urusan Pilihan yaitu Urusan Perikanan.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra SKPD Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

-

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan perikanan.

Sedangkan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan yaitu :

- a. Perumusan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sekretariat;
- b. Perumusan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan perikanan;
- c. Penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten;
- e. Penanganan kerawanan pangan tingkat kabupaten;
- f. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- g. Perumusan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT Dinas dan jabatan fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan;
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi konsumsi dan panganekaragaman pangan;
 - b. Seksi keamanan pangan segar;
5. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi pengelolaan TPI dan pemberdayaan Nelayan;
 - b. Seksi sarana dan teknologi penangkapan ikan;
6. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi produksi, usaha dan pemasaran ikan;
 - b. Seksi sarana, teknologi budidaya dan hama penyakit.

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terhitung per Agustus 2018 didukung oleh pegawai sebanyak 26 orang PNS, 20 orang Tenaga Kontrak Daerah dan 5 orang Penyuluh Perikanan Bantu.

1. Jumlah pegawai berdasarkan formasi.

- a. Pengisian formasi struktural terdiri dari eselon II, III, IV dan non eselon yaitu sebanyak 16 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Formasi

No	Formasi	Jumlah (Orang)	%
1	Eselon II	1	3,85
2	Eselon III	5	19,23
3	Eselon IV	12	46,15
4	Non Eselon	3	11,54
5	Analisis Ketahanan Pangan	-	-
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	-	-
7	Analisis Pasar Hasil Pertanian	-	-
8	Penyuluh Perikanan	5	19,23
	Jumlah	26	100

2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.

Dari 26 orang PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh pegawai berstatus golongan III sebanyak 18 orang (69,23%) yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	3	11,54
2	III	18	69,23
3	II	5	19,23
	Jumlah	26	100

3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan akhir, status pendidikan dengan ijazah SI (Sarjana) lebih mendominasi yaitu sebesar 86,36 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata 2 (S2)	-	-
2	Strata 1 (SI) dan D IV	22	84,62
3	D III	2	7,69
4	SLTA	2	7,69
	Jumlah	26	100

4. Tingkat kebutuhan pegawai.

Untuk tercapainya target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, keberadaan pegawai baik kuantitas maupun kualitasnya perlu mendapat perhatian. Dilihat dari kebutuhan pegawai, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat masih kekurangan pegawai dengan uraian dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel.2.4.
Kebutuhan Tenaga Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Manggarai Barat

1.

No	Uraian	Kebutuhan	PNS Yang Ada	Kekurangan
	Eselon II			
	Eselon III			
	Eselon IV			

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2011-2015, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

-

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2011 – 2015.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR OR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Rata-rata stok bahan pangan yang tersedia pada lumbung pangan terhadap kebutuhan pangan setiap bulannya (%)	100		52	64	76	88	100	53	66	78	90	100	102	103.125	102.632	102.273	100		
2	Ratio ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan masyarakat (%)	429,75		432	434	436	438	440	433	435	437	439	445	100	100.23	100.229	100.228	101.136		
3	produksi perikanan tangkap (Ton)	236.572		45.864	46.551	47.339	48.049	48.769	45.541	46.183	48	50	50	0	0.09921	0.1014	0.10406	0.10252		
4	produksi perikanan budidaya air tawar (Ton)	66.30		13.00	13.13	13.26	13.39	13.52	14.65	15	15.6	15.9	17.6	113	114.242	117.647	118.745	130.178		
5	Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap	100		46.67	46.77	46.87	46.97	47.08	18	18.5	19.7	21.33	25.92	39	39.5553	42.0311	45.412	55.0552		

Dari Tabel 2.5 di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa Indikator yang rasio capainnya masih jauh dari target capaian kinerja (kurang dari 100%). Hal tersebut terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah kapasitas SDM yang belum optimal, sarana dan prasarana pendukung lainnya yang sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja SKPD, serta penentuan target yang terlalu tinggi.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya. Data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	ANGGARAN	REALISASI	
1	Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Perikanan				991.861.747	182.017.600					581.600.000	182.017.600				38.637	100	(81,65)	(69)
2	Perikanan Tangkap produksi perikanan budidaya air tawar				861.879.000	808.673.000					446.570.200	151.030.000				51.807	18,68	(6,17)	(66)
3					800.660.000	610.980.000					694.007.599	554.817.200				86.679	90,81	(21,69)	(20)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

- a. Penganekaragaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat masih di bawah ideal. Berdasarkan analisis Pola Pangan Harapan (PPH), skor tingkat keragaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 sebesar 68,2, dari total skor maksimum 100. Berdasarkan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015, walaupun tingkat ketersediaan energi melampaui standar ketersediaan energi yang diharapkan yaitu 2200 Kkal/Kap/hr, dimana ketersediaan energi Kabupaten Manggarai Barat sebesar 2.964 Kkal/Kap/hari, namun ketersediaan energi tersebut didominasi oleh tingkat konsumsi akan beras yang sangat tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Kondisi dimana Tingkat ketersediaan / konsumsi pangan yang didominasi oleh pangan tertentu saja (beras) tentunya beresiko untuk terjadinya kerawanan pangan.
- b. Kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum terbangun secara optimal sehingga upaya bersama masyarakat dalam mencegah kerawanan pangan terbatas.
- c. Kebijakan pengembangan komoditas pangan, termasuk teknologinya yang terfokus pada beras telah mengabaikan potensi sumber-sumber pangan karbohidrat lainnya, dan lambatnya pengembangan produksi komoditas pangan sumber protein seperti sereal, daging, telur, serta sumber zat gizi mikro yaitu sayuran dan buah-buahan. Kondisi demikian berpengaruh pada rendahnya keanekaragaman bahan pangan yang tersedia bagi konsumen.
- d. Belum tersusunnya dokumen *Grand Design* Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat.
- e. Pengaruh perubahan iklim dimana iklim yang tidak menentu menyebabkan prediksi tanam sulit dilakukan, anomaly iklim juga menyebabkan kering yang berkepanjangan dan menyebabkan gagal panen atau puso, maupun banjir yang menyebabkan kerusakan tanaman.
- f. Terbatasnya kemampuan kelembagaan produksi petani karena terbatasnya dukungan teknologi tepat guna, akses kepada sarana produksi, serta kemampuan pemasarannya.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan.

- a. Peluang untuk peningkatan produksi pangan, masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi, pengolahan lahan secara efektif, penggunaan bibit unggul maupun pembukaan lahan baru.
- b. Sarana prasarana dalam bentuk bangunan kantor beserta fasilitas kerjanya dan penunjang mobilitas pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan

penyuluhan sudah mulai tertata dengan baik, melalui pembiayaan DAK dan Dekonsentrasi Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT, maupun APBD Kabupaten Manggarai Barat;

- c. Perhatian masyarakat khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan stakeholder lainnya terhadap pembangunan ketahanan pangan sangat besar;
- d. Semakin baiknya infrastruktur transportasi antar wilayah meningkatkan aksesibilitas dan distribusi pangan antar wilayah.

-

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat adalah berkaitan dengan Urusan Pangan dan Perikanan. Hasil identifikasi masalah pangan dan perikanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masyarakat secara umum hanya menanam tanaman yang homogen	Pencapaian Skor Pola Pangan Rendah	Rendahnya SDM masyarakat tentang pangan dan terbatasnya lahan budidaya
2	Meningkatnya permintaan akan pangan segar yang belum tentu aman dikonsumsi	Belum optimalnya kelembagaan penanganan keamanan pangan di daerah	Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pangan segar yang aman
3	Pakan ikan mahal, 60-70% dari ongkos produksi	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Belum Optimal	Belum adanya Pabrik pembuat pakan ikan, sehingga pakan di datang kan dari daerah lain
		Usaha budidaya ikan akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan	
4	Sistem pendataan perikanan budidaya dan tangkap belum handal dan efisien	Rumusan kebijakan dan program pembangunan perikanan budidaya dan tangkap tidak tepat sasaran	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data perikanan budidaya dan tangkap, Terbatasnya SDM pengelola data perikanan budidaya dan tangkap
5	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya dan nelayan skala kecil	Usaha perikanan budidaya dan tangkap skala kecil tidak akan berkembang	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya dan tangkap terbatas
6	Kualitas Hasil perikanan tangkap dan budidaya menurun	Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya dan nelayan masih kurang	penggunaan bahan – bahan yang berbahaya dalam proses produksi budidaya dan hasil tangkapan ikan
7	Kepastian Tata ruang usaha perikanan budidaya dan tangkap	Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain, Tidak ada kepastian hukum dalam arti fisik dan fungsional bagi para investor perikanan budidaya dan tangkap serta Implementasi UU 23/2014 tentang pelimpahan kewenangan	Sustainability usaha perikanan budidaya dan tangkap tidak bisa di jamin, tidak ada jaminan bahwa perairan yang ada tidak akan tercemari baik oleh limbah industry, pertanian ataupun rumah tangga

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Visi Bupati Manggarai Barat terpilih Periode 2016-2021 yaitu “Menuju Kabupaten Manggarai Barat Yang Ramah, Maju Dan Sejahtera”. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi, dan salah satu Misi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat adalah Misi 2 yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis agrowisata dan agrobisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia berkualitas dan kemampuan IPTEK yang berwawasan lingkungan”.

Isu strategis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat yaitu Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat. Berdasarkan isu strategis tersebut, tujuan yang ingin dicapai yaitu 1) Meningkatkan ketahanan pangan dan mutu pangan; 2) Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Kabupaten Manggarai Barat yang "Ramah Maju dan Sejahtera"	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Misi dua (2): Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Agriwisata dan Agribisnis dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia, Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan	Permasalahan Pada Perangkat Daerah	
	Terbatasnya jumlah aparatur, SDM, sarana dan prasarana	Tidak adanya regulasi pengangkatan aparatur
	Rendahnya jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Rendahnya alokasi anggaran serta kegiatan pendidikan serta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur
	Rendahnya jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Rendahnya alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan penanganan daerah rawan pangan
	Pengawasan keamanan pangan segar belum optimal	Terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar
		Belum optimalnya kelembagaan penanganan keamanan pangan di daerah
	Rendahnya jumlah kelompok nelayan/pembudidaya ikan air tawar yang menggunakan sarana dan prasarana produksi perikanan	Terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
		Kebutuhan akan konsumsi pangan segar yang aman (bebas zat berbahaya) semakin meningkat
		Kegiatan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya telah dilaksanakan dengan baik demi tercapainya peningkatan produksi perikanan

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI.

Visi Kementerian Pertanian RI adalah “Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan;
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Tabel 3.3
Faktor – Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

No	Sasaran Renstra K /L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L.
1	Peningkatan diversifikasi pangan	Pola Konsumsi Pangan Belum ideal, menjadikan beras sebagai pangan utama sehingga pangan lokal lainnya dikesampingkan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT adalah : “*Terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga yang mandiri berbasis sumber daya lokal secara efektif, berkelanjutan menuju masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera Tahun 2018*”.

Untuk tercapainya visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT ditetapkan misi Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian, pengembangan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan, meliputi : Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan; Aspek distribusi pangan; dan Aspek konsumsi dan keamanan pangan.
2. Meningkatkan kualitas pemantauan, pengkajian, pengembangan dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, meliputi Aspek kelembagaan; Aspek Ketenagaan; dan Aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
3. Mengembangkan koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Tujuan yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari Visi dan Misi DKP Provinsi NTT yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan kelembagaan Ketersediaan dan Cadangan Pangan; Distribusi dan pemasaran dalam pengendalian harga pangan; serta kelembagaan konsumsi dan keamanan pangan dalam upaya menjamin kualitas dan kuantitas pangan masyarakat.
2. Meningkatkan upaya pengembangan koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Manggarai Barat;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- 3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- 4) Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan masih kurang;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kondisi lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat secara umum masih cukup baik. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Degradasi lahan akibat penggunaan bahan kimia;
- 2) Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
- 3) Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;
- 4) Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang;
- 5) Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- 6) Dampak pemanasan global semakin meningkat.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja program tersebut yaitu:

- 1) Masyarakat secara umum hanya menanam tanaman yang homogen;
- 2) Belum optimalnya kelembagaan penanganan keamanan pangan di daerah;
- 3) Ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar;
- 4) Usaha budidaya ikan akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan;
- 5) Rumusan kebijakan dan program pembangunan perikanan budidaya dan tangkap tidak tepat sasaran;

- 6) Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya dan nelayan masih kurang;
- 7) Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain, Tidak ada kepastian hukum dalam arti fisik dan fungsional bagi para investor perikanan budidaya dan tangkap serta Implementasi UU 23/2014 tentang pelimpahan kewenangan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan mutu pangan;
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;

Sasaran:

1. Meningkatnya Ketersediaan, akses dan keamanan Pangan;
2. Meningkatnya Pengembangan Perikanan Budidaya;
3. Meningkatnya Pengembangan Perikanan Tangkap;

Indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama periode Renstra 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Ketersediaan, akses dan keamanan Pangan	1 Meningkatkan ketahanan dan mutu pangan	1 Ketersediaan pangan utama	484	707.12	721.26	735.69	750.4	765.41	
			2 Ketersediaan energi (kilokalori)	5.749	5.590	5.702	5.820	5.936	6.055	
			3 Ketersediaan protein (gram)	206.47	190.47	194.28	198.17	202.13	206.17	
			4 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	0	81.49	82	83	84	85	
2	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1 Meningkatkan Perikanan Budidaya	5 Produksi perikanan tangkap (Ton)	49.872	51.613	52.000	53.000	54.000	55.000	
			6 Produksi perikanan budidaya (Ton)	71	17	18	19	20	21	
		2 Meningkatkan Kesejahteraan Petani/Nelayan	7 Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Petani	35	40	45	50	55	60	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

5.1 STRATEGI

1. Memperkuat cadangan pangan daerah baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh pemerintah Peningkatan;
2. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pengembangan di bidang diversifikasi konsumsi pangan;
3. Pemanfaatan kelembagaan, sarana prasarana pengawasan dan pembinaan mutu serta keamanan pangan;
4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya Perikanan;
5. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan;

5.2 KEBIJAKAN

1. mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat salah satunya melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Pemberdayaan dan pendampingan Lumbung Pangan Desa;
2. menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang melalui kegiatan Pemberdayaan dan Pendampingan Kelompok Wanita Tani;
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar;
4. Menjamin peningkatan produksi perikanan melalui berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya Perikanan;

Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketersediaan, akses dan keamanan Pangan	Meningkatnya ketahanan dan mutu pangan		Memperkuat cadangan pangan daerah baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh pemerintah Peningkatan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
				Pembinaan dan Pendampingan Lumbung Pangan Desa
				Penanganan Daerah Rawan Pangan
				Pembinaan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan
				Analisis Rasio Ketersediaan Pangan
			Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pengembangan di bidang diversifikasi konsumsi pangan	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
				Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)
			Pemanfaatan kelembagaan, sarana prasarana pengawasan dan pembinaan mutu serta keamanan pangan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Budidaya Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
		Optimalisasi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Pengembangan Balai Benih Ikan
Meningkatnya Kesejahteraan Petani/Nelayan		Pembinaan danPendampingan Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar
		Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta dua urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian Perikanan. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan mejadi 3 program yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
2. Program pengembangan perikanan tangkap;
3. Program pengembangan perikanan Budidaya;
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Nelayan.

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan dalam Tabel 6.1

TUJUAN	SKEMA	KODE	PROGRAM DAN REKTAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN REKTAM	DITJ AJUK PADA TAHUN FISCAL TAHUNAN	TABEL RENCANA PROGRAM DAN ISU-SALAH PERMASALAHAN										INDIKATOR KINERJA POKOK ACUAN RENCANA (DITJ)	UNIT KURVA				
						2015		2011		2018		2019		2020				2021			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP		
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Dana			PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PEMBIAYAAN			1	1	39.675.000	1	70.000.000	1	52.500.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	36.000.000	5	26.728.000	000P
							2	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	7	14.800.000	000P
							3	100.000.000	11	45.000.000	13	150.000.000	15	150.000.000	15	200.000.000	15	300.000.000	83	945.000.000	000P
							4	36.804.000	3	23.000.000	3	34.500.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	26.000.000	3	17.154.000	000P
							5	150.500.000	9	26.115.500	9	20.000.000	9	20.000.000	9	40.000.000	9	42.000.000	9	310.815.000	000P
							6	159.579.000	4	89.898.700	4	106.500.000	4	100.000.000	4	150.000.000	4	250.000.000	20	676.796.700	000P
							7	20.874.000	1	20.874.000	1	30.350.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.000.000	4	27.6315.000	000P
							8	254.148.000	3	244.218.500	3	270.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	260.000.000	21	1.544.364.500	000P
							9	48.720	48.872	51.813	52.000	884.900.000	53.000	1.000.000.000	54.000	1.380.000.000	55.000	1.287.800.000	985.289	4.004.000.000	000P
							10	500.000.000	39	1.277.839.440	6	186.500.000	10	350.000.000	15	400.000.000	20	537.500.000	96	3.711.839.440	000P
							11	179.062.500	1	179.062.500	1	200.000.000	1	210.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	000P
							12	9.000.000	1	9.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	6	658.000.000	000P
							13							100.000.000	1	100.000.000	1	500.000.000	3	900.000.000	000P

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN REGISTRASI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN REGISTRASI	DATA AWAL Mula tahun PENCAPAIAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN SUB-PROGRAM PENCAPAIAN										SATUAN UKURAN	LOKASI				
						2016		2017		2018		2019		2020				2021		KINERJA KINERJA POKOK KINERJA (2011)	
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP		
	Meningkatnya Produk Perikanan Budidaya	V	PROGRAM subsektor budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (Tn)	266	71	661.743,200	17	1.012.400,000	12	448.300,000	14	1.000.000,000	16	1.130.000,000	1	1.298.000,000	3	600.000,000	DPH	
			6. Operasi Pemeliharaan Perikanan T1	Jumlah Pakar Perikanan T1								1	200.000,000	1	200.000,000		200.000,000	3	600.000,000	DPH	
			1. Pengadaan Sarana Produksi dan Alat Berat Dengan Cara Misi Prol	Jumlah alat/properti yang diserahkan sistem	5							1	100.000,000	2	100.000,000		100.000,000	3	325.000,000	DPH	
			2. Pengembangan Balai Budidaya Ikan	Produksi ikan ikan	20.800	22.800	608.137,200	10.000	715.218,000	14.000	430.350,000	20.000	250.000,000	25.000	600.000,000	30.000	700.000,000	34.200	1.303.300,500	DPH	
			3. Peningkatan sarana budidaya perikanan	Jumlah sarana perikanan	1	1	9.000,000					1	200.000,000	1	200.000,000		200.000,000	5	349.000,000	DPH	
			4. Pengadaan Sarana Produksi dan Alat Berat Dengan Teknologi Tepat	Jumlah alat/properti yang diserahkan sistem				1	200.000,000			5	300.000,000	5	310.000,000		350.000,000	16	1.340.000,000	DPH	
			5. DED dan Rerang	dukungan DED kerangka								1	300.000,000				300.000,000	1	300.000,000	DPH	
	Meningkatnya Kemampuan Pemukiman Perikanan	V1	PROGRAM KEMASALIHAN PERIKANAN/PERIKANAN	Capaian dan kemampuan Tim/Perumahan	80	35	238.000,000	40		49	208.750,000	50	600.000,000	53	444.000,000		460.000,000		1.579.750,000	DPH	
			1. Pemeliharaan dan Perbaikan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah alat/properti yang diserahkan sistem	1	1	10.000,000			1	99.750,000	4	100.000,000	5	150.000,000		170.000,000	7	529.750,000	DPH	
			2. Fasilitas pengkajian hasil perikanan budidaya dan Non Komersial	Jumlah alat/properti yang diserahkan sistem		1	25.000,000	3	20.550,000	3	110.000,000	4	100.000,000	5	100.000,000		150.000,000	6	485.350,000	DPH	
			3. Pemeliharaan dan Perbaikan Budidaya Perikanan	Jumlah alat/properti yang diserahkan sistem		30	10.000,000	30	15.550,000			40	50.000,000	50	50.000,000	60	70.000,000	60	199.550,000	DPH	
			4. Pengembangan kelompok perikanan	Jumlah alat/properti yang diserahkan sistem		15	10.000,000					20	100.000,000	25	100.000,000	30	120.000,000	30	330.000,000	DPH	

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat serta isu-isu bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

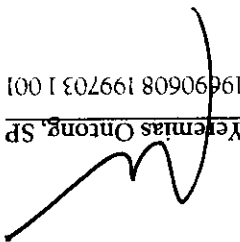
Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021. Untuk selanjutnya Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat ini akan dicindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya diharapkan dengan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 ini dapat mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2016-2021, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Labuan Bajo, Agustus 2018

Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Yemas Ontong, SP
NIP. 19690608 199703 1 001